



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 129 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUBLIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan daftar nama anggota Tim Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, perlu dilakukan pembaruan daftar nama Tim Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

KESATU : Lampiran I dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
52 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PUBLIK

NOMOR : 129 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUBLIK

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	Kepala
2.	Ketua	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Sekretaris	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
5.	Anggota	1. Odo R. M. Manuhutu	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
		2. Hermin Esti Setyowati	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3. Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
		4. Hayu Sihwati Lestari	Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundangundangan dan Administrasi Hukum	
		5. Sahadatun Donatirin	Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Kementerian Luar Negeri
		6. Asep N. Mulyana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		7. Unan Pribadi	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II	
		8. Julkhaidir	Perancang Madya merangkap Koordinator Harmonisasi Bidang	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
			Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal	
		9. Retno Endah K	Perancang Muda merangkap Sub Koordinator Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, Penganggaran, dan Perbendaharaan Negara	
		10. Eka Nurrahmadhani	Perancang Pertama pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II	
		11. Constantinus Kristomo	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	
		12. Adharinalti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
		13. Didyk Choiroel	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan
		14. Tri Budhianto	Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
		15. Ludiro	Direktur Sistem Perbendaharaan,	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
			Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
		16.Saiful Islam	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
		17.Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran	
		18.Lisbon Sirait	Direktur Sistem Penganggaran	
		19.Dedi Syarif Usman	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
		20.Encep Sudarmawan	Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	
		21.Purnama T. Sianturi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara	
		22.Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Direktur Hukum dan Humas	
		23.Nila Kumalasari	Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		24.Syahroni Ahmad	Kepala Biro Umum	Kementerian Perindustrian
		25.Ikana Yossye Ardianaingsih	Kepala Biro Hukum	
		26.Binoni Ti A. Napitupulu	Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		27. Isy Karim	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
		28. Krisna Ariza	Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
		29. Indro Pantja Pramodo	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		30. Putut Marhayudi	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		31. Hari Dwi Korianto	Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		32. Nanik Murwati	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		33. Ario Wiriandhi	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		34. Ari Anindya Hartika	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		35. Temmy Satya Permana	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi	
		36. Agus Kurniawan	Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Sekretariat Kabinet
		37. Muhamad Zulfikar Ali	Kepala Bidang Perindustrian	
		38. Raden Murwantara	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		39. Yan Setiadi	Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
		40. Lindawati Wardani	Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		41. Ida Bagus Kd Putra Narendra	Karo Ada B/J Slog Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		42. Anggis Rakhmi Ichsan	Direktur Departemen Pengadaan Strategis	
		43. Panji Ahmad	Direktur Departemen Hukum	Bank Indonesia
		44. Roro Sri Rachmawati	Direktur Departemen Hukum	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		45. Alex Kurniawan	Deputi Direktur Departemen Pengadaan Strategis	
		46. Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Lembaga Kebijakan Pengadaan
		47. Shahandra Hanitiyo	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Barang/Jasa Pemerintah
		48. Emin Adhy Muhaemin	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		49. Raden Ari Widianto	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	
		50. Dwi Wahyuni Kartianingsih	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	
		51. Fadli Arif	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	
		52. Yulianto Prihhandoyo	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	
		53. Patria Susantosa	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		54. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
		55. Hardi Afriansyah	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	
		56. R. Fendy Dharma Saputra	Direktur Sertifikasi Profesi	
		57. Muhammad Aris Supriyanto	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	
		58. Iwan Herniwan	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	
		59. Jhon Piter Halomoan Situmorang	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	
		60. Hermawan	Inspektur	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI